

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
Provinsi Sumatera Utara



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Sumatera Utara

Jl. S. Iskandar Muda No. 272 Medan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengembang amanah dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara berkaitan langsung dengan upaya Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, dimana hal ini merupakan satu kesatuan dari Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan LKIP ini diharapkan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Medan, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA



DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Penjelasan Umum Organisasi..... | 2 |
| 1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 2 |
| 1.1.2 Anggaran..... | 15 |
| 1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | 16 |
| 1.4 Dasar Hukum | 17 |
| 1.5 Sistematika Laporan Kinerja | 18 |
| BAB II | 20 |
| PERENCANAAN KINERJA | 20 |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | 20 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 | 26 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 26 |
| BAB III..... | 40 |
| AKUNTABILITAS KINERJA | 40 |
| 3.1 Capaian Kinerja | 40 |
| 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan | 41 |
| 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | 47 |
| 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi | 50 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3.1.4 | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | 51 |
| 3.1.5 | Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya..... | 56 |
| 3.1.6 | Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. | 59 |
| 3.2 | Realisasi Anggaran..... | 81 |
| BAB IV | | 95 |
| PENUTUP | | 95 |
| | | 96 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024..... | 16 |
| Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis | 20 |
| Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2024 | 22 |
| Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas P3AKB Provsu | 26 |
| Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024..... | 27 |
| Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2024 | 41 |
| Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja | 48 |
| Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis | 50 |
| Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi | 52 |
| Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran..... | 57 |
| Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan | 60 |
| Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Sumatera Utara..... | 15 |
|--|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, dengan beberapa fungsi sbb :

- a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;

- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. pengelolaan data dan informasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Analis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Perencana Ahli Muda

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketata laksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;

- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;
- i. melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan; ‘
- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- c. Kelompok Jabatan fungsional, pada jabatan Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; dan
- d. Pengadministrasi Umum.

C. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di daerah.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyelenggaraan koordinasi penanganan perlindungan hak perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Data dan Informasi

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Informasi; dan
- c. Pengadministrasi Umum

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan KB;
- c. Penyusun Kependudukan dan KB;
- d. Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelola Data Pengendalian Masyarakat.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Kesejahteraan Keluarga;
- c. Analis Pembinaan Keluarga Berencana;
- d. Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga.

G. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban;
- g. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan;
- h. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja

PTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengaduan;
- c. Seksi Tindak Lanjut.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi sumber daya manusia, seperti pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan ketatausahaan, seperti melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas, arsip serta barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- f. melaksanakan pencatatan data korban;
- g. melaksanakan kerumahtanggaan, seperti penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Subbagian Tata Usaha;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;

2) Seksi Pengaduan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- d. melaksanakan pengelolaan kasus;
- e. melaksanakan layanan perlindungan korban dan penampungan sementara di Rumah Perlindungan;
- f. melaksanakan layanan mediasi sebelum proses hukum (non litigasi);
- g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Pengaduan;

- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

3) Seksi Tindak Lanjut mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan mediasi yang berkaitan dengan proses hukum (litigasi);
- c. melaksanakan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- d. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- e. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Tindak Lanjut;
- f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

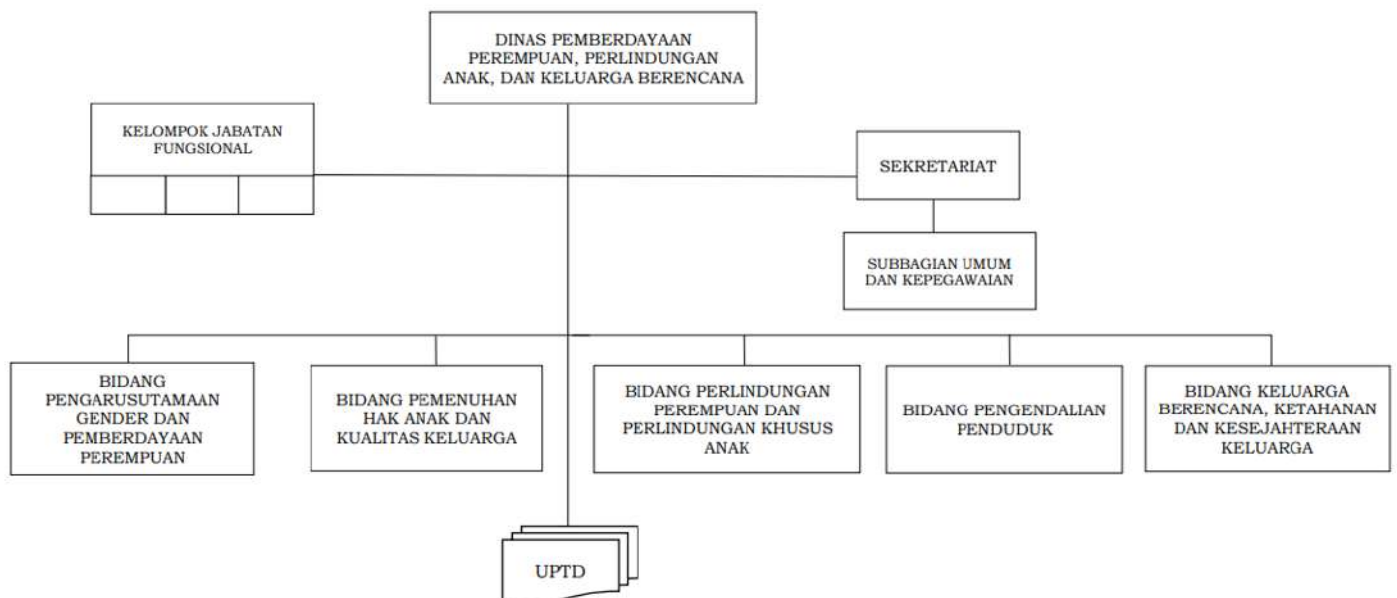
H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.1.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024

| Sumber | Tahun | Jumlah |
|---------------|--------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Urusan PPPA | | |
| APBD | Tahun 2023 | Rp 21.194.094.196 |
| APBD | Tahun 2024 | Rp 17.592.571.468 |
| Urusan PPKB | | |
| APBD | Tahun 2023 | Rp 758.763.760 |
| APBD | Tahun 2024 | Rp 174.770.700 |

Sumber : LRA BKAD Provsu

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana, yang masuk dalam agenda pembangunan pada tahun 2024 yaitu :

- Lemahnya integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Belum Optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup anak melalui Provinsi Layak Anak
- Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Belum seimbangya pertumbuhan penduduk, dan
- Belum optimalnya upaya ber KB dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang,

sebagaimana pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pemenuhan hak anak melalui Provinsi Layak Anak;
4. Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Anak;
3. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra 2024 |
|----|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan | Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi | % | 28% |
| | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | per 100.000 penduduk perempuan | 16 |
| 2. | | Meningkatkan Perlindungan Anak | Rasio kekerasan terhadap anak | per 100.000 penduduk usia anak | 28 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|------|
| | | | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi | % | 86% |
| 3. | | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Total Fertility Rate (TFR) | | 2,42 |

Sumber : Renstra Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan | | |
|----|--|---|--|--------|--|--|--|
| | | | | | Definisi Operasional | Formulasi/ Rumus Perhitungan | Sumber Data |
| 1. | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Meningkatkannya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi | % | Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. | $\frac{\text{Jumlah perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang responsive gender}}{\text{Jumlah keseluruhan perangkat daerah}} \times 100\%$ | Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Dinas P3AKB Provsu |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| 2. | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan | per 100.000 penduduk perempuan | Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) | $\frac{\text{Jumlah korban}}{\text{Jumlah penduduk perempuan 18 Thn ke atas}} \times \frac{\text{Jumlah korban usia anak perempuan 18 Thn ke atas}}{\text{Jumlah Anak usia sampai dengan 18 Thn}} \times 100.000$ | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu |
| | | | Rasio kekerasan terhadap anak | per 100.000 penduduk usia anak | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| 3. | Meningkatkan pemenuhan hak anak | Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi | % | Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak | $\frac{\text{Jumlah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung KLA}}{\text{Jumlah keseluruhan perangkat daerah di Sumut}} \times 100 \%$ | Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB Provsu |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|

| | | | | | | | |
|----|--|---|----------------------------|-------|---|--|--|
| 4. | Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Total Fertility Rate (TFR) | point | Totak Fertility Rate (TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksi nya | 1. SDKI: 5 tahunan 2. Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan 3. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan | Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P3AKB Provsu |
|----|--|---|----------------------------|-------|---|--|--|

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 :

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas P3AKB Provsu

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2023 |
|----|--|--|--|--------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan | Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi | % | 36% |
| 2. | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak | Rasio kekerasan terhadap perempuan | per 100.000 penduduk perempuan | 9 |
| | | | Rasio kekerasan terhadap anak | per 100.000 penduduk usia anak | 16 |
| 3. | Meningkatkan pemenuhan hak anak | Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak | Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi | % | 86% |
| 4. | Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas | Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana | Total Fertility Rate (TFR) | point | 2,42 |

Sumber : Rencana Kerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|------------|
| 1 | Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG | 28% |
| 2 | Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan | Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan | 16/100.000 |
| | | Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 jumlah penduduk usia anak | 28/100.000 |
| 3 | Meningkatnya Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) | 86% |
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rete (Angka Kelahiran Total) | 2,42 |

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 :

**Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | | Indikator | Target |
|----------|--|--|---|--------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran | 100 % |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun | 11 Dok |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 13 kali |
| | 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen |
| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| | 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 kegiatan |
| | 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 68 stel |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 2 kali |

| | | | | |
|-----|---|---|--|-------------|
| | | | Bangunan Kantor yang Disediakan | |
| | 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 8 buah |
| | 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 4 kali |
| | 9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 kali |
| | 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 960 Dok |
| | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 laporan |
| I.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan |
| | 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 laporan |
| | 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan |
| I.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 kali |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---------------------|
| | 16 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 unit |
| | 17 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10 unit |
| II | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBD Provinsi | 100 % |
| II.1 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | |
| | 18 | Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | 1 kebijakan |
| | 19 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 42 perangkat daerah |
| II.2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | |
| | 20 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang | 25 lembaga |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--------------|
| | | | politik, hukum, sosial dan ekonomi | |
| II.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | |
| | 21 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat provinsi | 20 orang |
| III | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi | 100 % |
| III.1 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | 22 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 350 Orang |
| | 23 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan | Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban | 70 layanan |

| | | | | |
|-------|----|---|--|-----------|
| | | Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Kekerasan Kewenangan Provinsi | |
| III.2 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | |
| | 24 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | 250 Orang |
| | 25 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | - Dok |
| | 26 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 20 orang |
| III.3 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | |
| | 27 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dok |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|------------------|
| | | Perempuan Kewenangan Provinsi | | |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia | % 100 |
| IV.1 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | |
| | 28 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | 1 doku men |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | Persentase data gender tersedia | 100 % |
| V.1 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| | 29 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | - Dok |
| | 30 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | - Dok |
| VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | Persentase variabel kluster hak anak terimplementasi | 100 % |
| VI.1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--|-----|------------------|
| | 31 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 24 | Perangkat daerah |
| VI.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | |
| | 32 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 430 | Orang |
| | 33 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | kegiatan |
| VII | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | Persentase Kebijakan Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terimplementasi | 100 | % |
| VII.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | | | | |
| | 34 | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | - | Orang |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--------------|
| | 35 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 1 Dok |
| VII.2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | |
| | 36 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | 200 |
| VII.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota | | | |
| | 37 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi | - Dok |
| | 38 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | kegiatan |
| | 39 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | 20 orang |
| VIII | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | 100 % |

| | | | | |
|--------|---|--|--|-----------|
| VIII.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | |
| | 40 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | 3 laporan |
| | 41 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | 1 Dok |
| | 42 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program bangga Kencana dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | 3 Daerah |
| VIII.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | | |
| | 43 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 Dok |

| IX | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | 100 % |
|------|---|--|-----------|
| IX.1 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | |
| | 44 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 4 Dok |
| | 45 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 2 Dok |
| | 46 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | 3 dok |
| | 47 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai | 3 laporan |

| | | | | |
|----------|---|---|--|--------------|
| IX.2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | 100 % |
| | 48 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 2 Organisasi |
| X | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | 100 % |
| X.1 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | |
| | 49 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah Kelompok Genre yang dibina | 4 kelompok |
| | 50 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | 2 Laporan |
| | 51 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 3 Dokumen |

| | | | | |
|-----|----|---|---|---------------|
| | 52 | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 5 Unit |
| X.2 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | |
| | 53 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 3 doku men |
| | 54 | Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga / Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di Tingkat provinsi dan kab kota | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga | 2 Lapo ran |

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas P3AKB Provsu
Tahun 2024*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Sumber Data |
|----|---|---|--------|-----------|---------|---|
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 24% | 54,7% | 237,5 % | Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AKB Provsu |
| 2 | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 11,4 | 11,21 | 98% | Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 2,8 | 2,66 | 95% | |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota | 86% | 80% | 93% | Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas |

| | | (menuju) Layak Anak | | | | P3AKB Provsu |
|---|--|--|------|------|------------|---|
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 2,42 | 2,36 | 102,5 % | Bidang Pengendali an Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana , Ketahanan dan Kesejahter aan Dinas P3AKB Provsu |

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2024 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 10 Perangkat Daerah atau sebesar 24% dari total jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 23 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Adapun ke 23 Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Biro Hukum Setdaprovsu
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
5. Biro Perekonomian Setdaprovsu
6. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
7. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
8. Biro Organisasi Setdaprovsu
9. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
12. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
18. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
20. RSUD Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
21. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
22. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
23. RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian sebanyak 23 Perangkat Daerah dari target sebanyak 10 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender,

mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik.

Sasaran Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mengalami Kekerasan.

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2024, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 11,4. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 623 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.556.410. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11,21 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 2,8 dari setiap 10.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 1.199 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.499.909. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap anak dari setiap 10.000 penduduk usia anak, sebanyak 2,66 orang anak mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, memperlihatkan perlunya intervensi yang lebih kuat kepada upaya pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 26 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 86% dari Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA (30 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 24 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 80% dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Dinas Sosial
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perikanan dan Kelautan

11. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
12. UPTD Khusus RSU Haji Medan
13. Dinas Perhubungan
14. UPTD Khusus Rumah sakit jiwa Prof.Dr.M. Ildrem
15. Dinas Pendidikan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
18. Biro Umum Setdaprovsu
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Badan Pendapatan Daerah
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan
22. TP PKK

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai pengampu kegiatan implementasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak.

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka Kelahiran Total menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator TFR dibutuhkan untuk dapat membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan

kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, TFR juga dapat digunakan sebagai salah satu parameter proyeksi jumlah penduduk.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Faktor Ekonomi misalnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi fertilitas. Ketika pendapatan seseorang meningkat akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas.

Berdasarkan PK23 ADJ SUSENAS 2024, TFR Sumatera Utara sebesar 2,36 mengalami penurunan 0,03 poin dari tahun 2023 yaitu 2,39 (Long Form SP 2020). Namun, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional sebesar 2,18 (PK23 ADJ SUSENAS 2023).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | | |
|----|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | Realisasi | Realisasi | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 94% | 100% | 24% | 54,7% | 237,5 % |
| 2 | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 11 | 7 | 11,4 | 11,21 | 98% |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 19 | 19 | 2,8 | 2,66 | 95% |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 70% | 100% | 86% | 80% | 93% |
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 2,48 | 2,39 | 2,42 | 2,36 | 102,5 % |

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2022-2024

Capaian sasaran strategis Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun 2022 adalah sebesar 94 persen atau sebanyak 44 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender, mengalami peningkatan sebesar 6 persen pada tahun 2023 menjadi 100 persen (44 OPD), dan tahun 2024 sebesar 54,7 persen atau sebanyak 23 Perangkat Daerah telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender yang tertuang di dalam agenda pembangunan daerah. Pada tahun 2022 dan 2023 kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hanya sampai tahap perencanaan, sedangkan pada tahun 2024 kriteria diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%.

Untuk capaian strategis Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan, dengan indikator kinerja yang terbagi kepada 2 indikator yaitu Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 penduduk usia anak. Pada tahun 2022 dari 100.000 penduduk perempuan sebanyak 11 penduduk perempuan mengalami kekerasan, capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 7 orang penduduk perempuan dan pada tahun 2024 sebanyak 11,4 orang penduduk perempuan mengalami kekerasan.

Pada sasaran strategis nomor 4 (empat) yakni “Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)” menunjukkan terjadinya tren penurunan angka realisasi TFR dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, nilai TFR terealisasi sebesar 2,36 (di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 2,42), yang artinya rata-rata

setiap keluarga yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki 2-3 orang anak.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Realisasi Tahun 2024 | Target Akhir Rencana Strategis | Tingkat Kemajuan |
|----|---|---|----------------------|--------------------------------|------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | (6) =4/5*100 |
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 54,7% | 28% | 195% |
| 2 | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 11,21 | 16 | 70% |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 2,66 / 10.000 | 28 / 100.000 | 95% |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 80% | 86% | 93% |

| | | | | | |
|---|---|--|------|------|--------|
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 2,36 | 2,42 | 102,5% |
|---|---|--|------|------|--------|

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Bila melihat pada target capaian di akhir rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024, maka terdapat 1 indikator yang melebihi target (195 persen) untuk akhir rencana strategis (tahun 2024) yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG atau sebanyak 23 perangkat daerah telah menyusun PPRG. Pada tahun sebelumnya kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hanya sampai tahap perencanaan, sedangkan pada tahun 2024 kriteria diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%.

Untuk beberapa indikator strategis lainnya seperti Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak (93 persen) atau sebanyak 23 perangkat daerah potensial telah melaksanakan program/kegiatan yang mendukung upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar 70 persen, Rasio Kekerasan Terhadap Anak dengan capaian sebesar 95 persen, indikator TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 97 persen.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|---|--|--------|-----------|---------|--|---|
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 24% | 54,7% | 237,5% | Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasi indikator melalui optimalisasi tugas dan fungsi dari SDM yang terlibat aktif dalam integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara |
| 2 | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 11,4 | 11,21 | 101,6% | Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan | Penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|----------|---|---|
| | terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 2,8 | 2,66 | 105,2% | dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan | kekerasan termasuk TPPO Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pemberian layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 86% | 80% | 93% | 1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara. 2. Kurang maksimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara | 1. Menyusun RAD KLA Provinsi Sumatera Utara sebagai pedoman/peta jalan perwujudan Kab./Kota Layak Anak di Sumatera Utara menuju Provinsi Sumatera Utara Layak Anak (PROVILA) 2. Melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap anggota Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara |
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 2,42 | 2,36 | 102,54 % | Meningkatnya capaian Persentase WUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan alkon yang sudah terdistribusi ke seluruh faskes yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta adanya sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas antara Pusat, Provinsi dan Daerah | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Bila melihat tabel di atas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja dari urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara.

Capaian dari indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, mencapai lebih dari 100 % dari target. Hal ini salah satunya dikarenakan target yang diturunkan menjadi 24% karena kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun ini tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%. Secara umum capaian ini juga didukung oleh tingginya komitmen dari para pengambil kebijakan di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian upaya peningkatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara.

Beberapa indikator yang tidak tercapai hingga akhir kinerja Renstra (Tahun 2024) seperti Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak membutuhkan Penguatan kebijakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder potensial.

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, dan indikator Angka Kelahiran Total, memiliki kendala pada minimnya anggaran intervensi dan beberapa kendala teknis lainnya seperti belum

optimalnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan dan belum meluasnya jejaring mitra intervensi program dan kegiatan di 33 kabupaten/kota. Dengan kondisi ini maka Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan beberapa strategi seperti upaya peningkatan koordinasi dalam penyesuaian anggaran intervensi yang meliputi 33 kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM teknis serta perluasan jejaring kerjasama mitra yang melibatkan lembaga/organisasi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik budaya dan segmentasi sasaran.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----|---|---|---------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | 24% | 54,7% | 237,5% | 174.494.000 | 147.069.000 | 84,28% | 354.899.000 |
| 2 | Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan | 11,4 | 11,21 | 98% | 517.681.520 | 453.574.741 | 87,62% | 139.421.800 |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 2,8 | 2,66 | 95% | 202.903.750 | 148.805.150 | 73,34% | 44.626.300 |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 86% | 80% | 93% | 152.557.000 | 150.199.438 | 98,45% | 371.711.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 2,42 | 2,36 | 102,5% | 115.755.70 0 | 115.305.70 0 | 99,61% | 250.011.00 0 |
|---|--|---|------|------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Capaian | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian | Menunggu / Tidak Menunggu | Analisis |
|----|---|--|---------|---|--|-------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | 100% | | |
| | | | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | 19% | | |
| | | | | Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | 1 kebijakan | menunggu | Penyusunan dokumen Rencana Aksi Implementasi PUG di Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahapan draft sehingga akan dikuatkan dengan upaya optimalisasi koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------|--|---|
| | | | | | | | penyusunan Rencana Aksi PUG Sumatera Utara | |
| | | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 42 perangkat daerah | menunjang | Masih muncul kendala terkait dengan teknis penyusunan dokumen PPRG sehingga memerlukan penguatan fungsi Kelompok Kerja PUG yang di tingkat Provinsi |
| | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | 36% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|---------------|---|
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 25 lembaga | menunja ng | Belum optimalnya pelaksanaan penguatan perempuan dalam bidang politik melalui pelaksanaan kegiatan penguatan politik bagi perempuan untuk menyambut tahun politik tahun 2024 |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | | 49% | | |
| | | | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari /Sehat/Pintar/K epemimpinan/H | 20 orang | menunja ng | Belum optimalnya penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan berbasis data sehingga disusun database bagi lembaga-lembaga yang menyediakan layanan Pemberdayaan Perempuan di Sumut |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | ukum pd LPLPP tingkat provinsi | | | |
| 2 | Meningkatn ya layanan dan upaya perlindunga n terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan | Rasio Kekerasan Terhadap Perempua n | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementas i | 100% | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota | | 77% | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan | 350 orang | menunja ng | Belum terbangunnya layanan berbasis aplikasi online sehingga akan disusun rencana pembuatan layanan pengaduan berbasis aplikasi online |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------|-----------|--|
| | | | | Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Layanan Pengaduan Masyarakat | | | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 70 layanan | menunjang | Belum ada intervensi pencegahan berbasis data pemetaan melalui upaya pemetaan intervensi kekerasan berbasis data |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | 40% | | |
| | | | | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan | 250 orang | menunjang | Belum optimalnya distribusi kebutuhan spesifik kepada perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus akan dioptimalkan melalui alokasi anggaran yang memadai |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------|---------------|---|
| | | | | Kewenangan Provinsi | Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | | | |
| | | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | - dok | menunja ng | Jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan masih belum tersebar ke 33 kab/kota dan akan dioptimalkan melalui koordinasi antar provinsi dan kab/kota |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 20 orang | menunja ng | Kegiatan belum menyentuh keseluruhan kab/kota sehingga akan disusun peta potensi |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|------------|---------------|--|
| | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 81% | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 dok | menunja ng | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis |
| | | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | 91% | | |
| | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak | | 93% | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|---|
| | | | | Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | | | | |
| | | | | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | - Orang | menunjang | Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan anak dalam kondisi khusus sehingga akan disusun databased AMPK Sumut, melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 1 dok | menunjang | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota | | 89% | | |
| | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | -dok | menunja ng | Belum optimalnya kampanye AMPK ke Kab/Kota Akan disusun rencana kegiatan yang lebih efisien |
| | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | - kegiatan | menunja ng | Terjadinya rotasi perubahan SDM pengampu kegiatan di Lembaga Penyedia Layanan sehingga akan disusun buku pintar bagi Lembaga Penyedia Layanan AMPK |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|---------------|---|
| | | | Kewenangan Provinsi | | | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 4 dok | menunja ng | Belum ada intervensi pencegahan berbasis data pemetaan Akan disusun pemetaan intervensi kekerasan berbasis data |
| | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | 91% | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|-------------|-----------|---|
| | | | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | 200 orang | menunjang | Masih terbatasnya layanan yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga akan dioptimalkan dengan penguatan koordinasi dalam pemberian layanan bagi AMPK yang memerlukan peran berbagai pihak |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak | 100% | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | 100% | | |
| | | | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | 95% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------------|-----------|---|
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 24 perangkat daerah | menunjang | <p>1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara.</p> <p>2. Belum optimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara.</p> |
| | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | 84% | | |
| | | | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 350 Orang | menunjang | Belum tersedianya layanan terpadu untuk peningkatan kualitas hidup anak yang akan diintervensi dengan pelaksanaan kegiatan terintegrasi dan terpadu untuk penyediaan dan peningkatan kualitas hidup anak |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----|--|---|-------------|------------|---|
| | | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 1 kegiatan | menunja ng | Belum tersusunnya data base penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak menyebabkan upaya peningkatan kualitas hidup anak belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan databased terkait dengan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di 33 kabupaten/kota |
| 4 | Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) | 84% | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | 100% | | |
| | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | 60% | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|-----------|--|
| 6 | | | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK | 3 laporan | menunjang | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) berjalan dengan baik |
| | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | 1 dok | menunjang | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi dapat dilaksanakan dengan optimal |
| | | | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi | 3 daerah | menunjang | Anggaran untuk melakukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB sangat terbatas sehingga memerlukan peningkatan alokasi anggaran yang |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|-----------|--|
| | | | | KKBPK dan Sektor Lain | Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | | | dilaksanakan melalui pengusulan peningkatan anggaran |
| | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | 40% | | |
| | | | | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 dok | menunjang | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilaksanakan secara optimal |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA | | | | |

| BERENCANA (KB) | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|
| Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | |
| Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 4 dokumen | | 1. Strategi kemitraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Program KB belum optimal sehingga perlu upaya pada peningkatan kolaborasi program kerja dengan mitra dan sektor terkait 2. Penyelenggaraan Advokasi dan KIE perlu di tingkatkan melalui peningkatan kegiatan advokasi dan KIE 3. Anggaran untuk melakukan pembinaan, |
| Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program | 2 dokumen | menunjang | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|--|---|
| | | | | Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | peningkatan dan pengembangan strategi penyelenggaraan Program KB sangat terbatas melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi akses dan kualitas pelayanan KB yang merata bagi masyarakat serta menyusun usulan kegiatan yang menjangkau sasaran khusus seperti: keluarga berisiko stunting dan PUS muda. |
| | | | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | 3 dok | | |
| | | | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan | 3 laporan | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------|-----------|
| | | | | Kearifan Budaya Lokal | Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai | | |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | |
| | | | | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana | 2 Organisasi | menunjang |

| | | | | |
|--|---|------------|-----------|--|
| | (Bangga Kencana) | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | |
| Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | |
| Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah Kelompok Genre yang dibina | - kelompok | menunjang | Belum semua Kab/Kota dapat di jangkau sebagai target sehingga perlu dilakukan penambahan Target Kab/Kota |
| Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | - laporan | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | - dokumen | | |
| Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | - unit | | |
| Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------|--|--|
| | | | | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 3 dokumen | | |
| | | | | Fasilitasi kegiatan pemberdayaanEkonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga | 2 laporan | | |

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 16.459.982.692 | 15.741.786.524 | 96% |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 85.466.150 | 85.465.500 | 100% |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun | 85.466.150 | 85.465.500 | 100% |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 13.001.290.841 | 12.410.797.304 | 95% |
| 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 12.798.280.841 | 12.209.957.304 | 95% |
| 3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah jasa yang disediakan | 203.010.000 | 200.840.000 | 99% |
| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 144.400.000 | 142.570.000 | 99% |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 86.250.000 | 86.250.000 | 100% |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 58.150.000 | 56.320.000 | 97% |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 948.879.143 | 927.061.602 | 98% |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---------------|------|
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13.757.522 | 13.756.450 | 99% |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 105.591.503 | 97.900.000 | 93% |
| 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 173.730.168 | 171.466.200 | 98% |
| 9 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 39.348.900 | 30.290.000 | 77% |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 4.747.000 | 4.745.000 | 99% |
| 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 611.704.050 | 608.903.952 | 100% |
| I.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.882.601.192 | 1.808.477.705 | 96% |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 454.400.000 | 439.047.926 | 97% |
| 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 1.425.671.692 | 1.366.916.779 | 96% |
| 14 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.529.500 | 2.513.000 | 99% |
| I.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 397.345.366 | 367.414.413 | 92% |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan dilakukan | 248.461.366 | 219.996.413 | 88% |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| 16 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | 126.944.000 | 126.278.000 | 99% |
| 17 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan sarana pendukung yang dilakukan | 21.940.000 | 21.140.000 | 96% |
| II | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | 174.494.000 | 147.069.000 | 84% |
| II.1 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | 116.613.000 | 94.138.000 | 81% |
| 18 | Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi | 84.635.000 | 63.818.000,00 | 75% |
| 19 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 31.978.000 | 30.320.000 | 95% |
| II.2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | 44.381.000 | 39.431.000 | 89% |
| 20 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, | 44.381.000 | 39.431.000 | 89% |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| | | Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | |
| II.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | | 13.500.000 | 13.500.000 | 100% |
| 21 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari / Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP tingkat provinsi | 13.500.000 | 13.500.000 | 100% |
| III | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | 517.681.520 | 453.574.741 | 87% |
| III.1 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 325.814.520 | 271.668.491 | 77% |
| 22 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 208.074.520 | 199.779.491 | 96% |

| | | | | | |
|-------|---|--|-------------|-------------|-----|
| 23 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 117.740.000 | 71.889.000 | 61% |
| III.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | 141.019.500 | 131.813.250 | 88% |
| 24 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | 106.510.750 | 103.751.250 | 97% |
| 25 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ | 0 | 0 | 93% |
| 26 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 34.508.750 | 28.062.000 | 81% |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|------------|
| III.3 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | 50.847.500 | 50.093.000 | 98% |
| 27 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 50.847.500 | 50.093.000 | 98% |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | 84.952.506 | 57.682.550 | 68% |
| IV.1 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | 84.952.506 | 57.682.550 | 68% |
| 28 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | 84.952.506 | 57.682.550 | 68% |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| V.1 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | 0 | 0 | 0% |
| VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | 152.557.000 | 150.199.438 | 98% |
| VI.1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | 1.792.000 | 1.792.000 | 100% |
| 30 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 1.792.000 | 1.792.000 | 100% |
| VI.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | 150.765.000 | 148.407.438 | 98% |
| 31 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 140.629.000 | 139.490.000 | 99% |

| | | | | | |
|------------|---|--|--------------------|--------------------|------------|
| 32 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 10.136.000 | 8.917.438 | 87% |
| VII | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | 202.903.750 | 148.805.150 | 91% |
| VII.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | | 50.655.000 | 50.655.000 | 100% |
| 33 | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi | 50.655.000 | 50.655.000 | 100% |
| 34 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 0 | 0 | 0% |
| VII.2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | 117.740.000 | 70.081.150 | 60% |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------------|--------------------|------------|
| 35 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi | 117.740.000 | 70.081.150 | 60% |
| VII.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota | | 34.508.750 | 28.069.000 | 81% |
| 36 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi | 0 | 0 | 0% |
| 37 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | 34.508.750 | 28.069.000 | 81% |
| VIII | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | 115.755.700 | 115.305.700 | 98% |

| | | | | | |
|--------|--|--|------------|------------|------|
| VIII.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | 86.861.000 | 86.411.000 | 99% |
| 39 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK | 20.760.000 | 20.310.000 | 98% |
| 40 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | 11.000.000 | 11.000.000 | 100% |
| 41 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | 55.101.000 | 55.101.000 | 100% |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|------------|
| VIII.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | 28.894.700 | 28.894.700 | 100% |
| 42 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 28.894.700 | 28.894.700 | 100% |
| IX | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | 35.415.000 | 35.415.000 | 89% |
| IX.1 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | 35.415.000 | 35.415.000 | 100% |
| 43 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 35.415.000 | 35.415.000 | 100% |
| 44 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|------|--|--|---|---|----|
| 45 | Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | 0 | 0 | 0% |
| 46 | Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai | 0 | 0 | 0% |
| IX.2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | 0 | 0 | 0% |
| 47 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|------------|
| X | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | 23.600.000 | 23.100.000 | 98% |
| X.1 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah Kelompok Genre yang dibina | 0 | 0 | 0% |
| 49 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | 0 | 0 | 0% |
| 50 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 0 | 0 | 0% |
| 51 | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 0 | 0 | 0% |
| X.2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 23.600.000 | 23.100.000 | 98% |
| | dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 52 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 13.731.000 | 13.431.000 | 98% |
| 53 | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga | 9.869.000 | 9.669.000 | 98% |
| | | | 17.767.342.168 | 16.872.938.103 | 94,97% |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera memiliki 6 sasaran strategis yang secara umum keseluruhannya tercapai.
2. Faktor keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah kuatnya koordinasi pelaksanaan intervensi program dan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun capaian


tersebut masih perlu terus ditingkatkan dengan berbagai macam inovasi dan langkah konkret, melalui beberapa langkah :

1. Menyusun peta jalan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Memetakan potensi intervensi di tiap lokasi sasaran prioritas untuk memberikan garansi ketepatan pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan dan perluasan jejaring mitra hingga ke level terkecil dari kelompok masyarakat;
3. Perbaikan dari kualitas perencanaan dan anggaran yang berbasis pada hasil (outcome).
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA



DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002